

# DARI WILHELMINA KE HINOMARU: HEGEMONI BELANDA DAN JEPANG PADA MASA PERANG PASIFIK DI SULAWESI UTARA DALAM PRANGKO

**Christopher Alexander Setiawan Tampenawas**

*Peneliti*

*Perkumpulan Filateli Indonesia*

## **ABSTRACT**

*The Pacific war began to break out, Japan started its propaganda and invasion to control all of Asia, the Dutch East Indies did not escape the Japanese target, including the North Sulawesi region which is considered the ninth province of the Netherlands, an area that has a great influence in the supply of natural resources, military and also Dutch propaganda, but all of them were broken by the Japanese with the entry of Japan into North Sulawesi. This paper will discuss how the struggle for Hegemony between the Netherlands and Japan at the end of the Dutch East Indies was shown by the overlapping changes to the Dutch East Indies stamps, especially the stamps with the image of Queen Wilhelmina in North Sulawesi.*

**Keywords:** *Hegemony, North Sulawesi, Netherlands, Japan, Stamp*

## **LATAR BELAKANG**

Pecahnya perang Pasifik membuat Jepang memulai propaganda dan invasinya untuk menguasai seluruh Asia, Hindia Belanda pun tidak luput dari incaran Jepang termasuk wilayah Sulawesi Utara yang dianggap sebagai provinsi ke sembilan dari Belanda, wilayah yang memiliki pengaruh besar dalam suplai sumber daya alam, militer dan juga propaganda Belanda, tetapi semuanya dipatahkan oleh Jepang dengan masuknya Jepang ke Sulawesi Utara, ada banyak pertentangan oleh Belanda maupun masyarakat sekitar.

Terjadinya pergantian pemerintahan yang membuat sistem tata kelola pemerintahan menjadi kacau dikarenakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang membedakan antara Militer dan sipil dalam pemegang kekuasaan dan juga perannya di tanah kolonial sedangkan pemerintahan Jepang dipegang seutuhnya oleh militer, pada masalah di Sulawesi Utara angkatan Laut Jepang lah yang memimpin kekuasaan.

Prangko merupakan media dan sumber sejarah dalam memahami permasalahan perebutan Hegemoni yang terjadi, prangko merupakan komoditas penting pada masa tersebut dimana kedudukan yang sama dengan uang menjadikan prangko alat propaganda sempurna untuk melegitimasi kekuasaan penguasa di suatu wilayah

Adanya cetak tindih Hinomaru diatas prangko-prangko Hindia Belanda di Sulawesi Utara menguatkan bukti bahwa terjadi perebutan Hegemoni antara Belanda dan Jepang di wilayah Sulawesi Utara, dikarenakan simbol agung Belanda yaitu sang ratu dengan terang terangan di tutup oleh Hinomaru yang merupakan lambang kekaisaran Jepang. Cetak tindih merupakan media darurat untuk menyatakan kekuasaan sesuatu pemerintahan yang menguasai wilayah tertentu dengan cepat dapat menyatakannya lewat melakukan cetak

tindih pada Prangko yang telah ada di wilayah tersebut, dalam kausa ini pergantian Simbol yang sangat dramatis pun terjadi antara simbol sang Ratu dengan Hinomaru, dan pada wilayah kekuasaan angkatan laut Jepang hanya terjadi di Sulawesi Utara dimana Simbol Ratu harus dihapuskan dan diganti dengan Hinomaru, hal ini merupakan kejadian yang spesifik hanya dilakukan di Sulawesi Utara pada wilayah angkatan laut dikarenakan faktor-faktor bahwa di wilayah Sulawesi Utara merupakan wilayah dengan simpatisan Belanda terbesar di Hindia Belanda, politik tersebut harus diambil Jepang agar nasionalisme dan faham anti Belanda di Sulawesi Utara berkembang pada masa tersebut, juga Sulawesi Utara merupakan basis dari KNIL Minahasa yang memiliki kekuatan cukup kuat di Hindia Belanda

Hal-hal tersebut memicu Jepang untuk menduduki Sulawesi Utara terlebih kawasan Minahasa dengan susah payah, dan diperlukannya kebijakan menutup simbol ratu pada prangko dan menggantinya dengan Hinomaru, menjadikan Hegemoni kekuasaan antara Belanda dan Jepang pada masa perang pasifik.

## **TUJUAN**

Tujuan dari Jurnal ini adalah untuk melihat adanya urgensi pada masa perang pasifik bahwa wilayah Sulawesi Utara merupakan wilayah yang penting dikuasa karena benteng terakhir dari Belanda di Hindia Belanda lewat perkembangan prangko, melihat tujuan hegemoni antara Belanda dan Jepang dan pergantian kekuasaan ditandai dengan cetak tindih prangko Hindia Belanda dan menutup simbol Ratu pada prangko dengan Hinomaru, membandingkan kegunaan dari prangko dan fungsi prangko sebagai propaganda maupun ajang unjuk kekuasaan dari penguasa di suatu wilayah, melihat prangko sebagai sumber sejarah yang mencatat kejadian-kejadian krusial pada masa hegemoni Belanda dan Jepang pada masa Perang Pasifik.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pengertian Hegemoni**

Hegemoni merujuk pada dominasi suatu negara-kota terhadap negara-kota lain dan berkembang menjadi dominasi ekstrem negara terhadap negara lain. Antonio Gramsci mengembangkan makna awal tersebut untuk merujuk pada dominasi suatu kelas sosial terhadap kelas sosial lain dalam masyarakat melalui hegemoni budaya. (*Joseph, Jonathan: 2002, Hegemony: A Realist Analysis, New York: Routledge*). Hegemoni menentukan politik negara bawahannya melalui imperialisme budaya, misalnya bahasa penguasa dan birokrasi (sosial, ekonomi, pendidikan, pemerintahan), untuk memformalkan dominasinya. Hal ini membuat kekuasaan tidak bergantung pada seseorang, tetapi pada aturan tindakan (*Slack, Jennifer Daryl: 1996, The Theory and Method of Articulation in Cultural Studies*). "hegemoni" atau menguasai dengan "kepemimpinan moral dan intelektual" secara konsensual. Dalam konteks ini, Gramsci secara berlawanan mendudukan hegemoni, sebagai satu bentuk supermasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas yang lainnya, dengan bentuk supermasi lain yang ia namakan "dominasi" yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik (*Sugiono, 1999: 31*).

Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus (*consenso*) dari pada melalui penindasan terhadap kelas sosial lain. Ada berbagai cara yang dipakai, misalnya melalui yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dari masyarakat itu. Itulah sebabnya

hegemoni pada hakekatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan (Gramsci, 1976: 244). Dalam konteks tersebut, Gramsci lebih menekankan pada aspek kultural (ideologis). Melalui produk-produknya, hegemoni menjadi satu-satunya penentu dari sesuatu yang dipandang benar baik secara moral maupun intelektual. Hegemoni kultural tidak hanya terjadi dalam relasi antar negara tetapi dapat juga terjadi dalam hubungan antar berbagai kelas sosial yang ada dalam suatu negara. Ada tiga tingkatan yang dikemukakan oleh Gramsci, yaitu hegemoni total (integral), hegemoni yang merosot (decadent) dan hegemoni yang minimum (Femia, 1981).

Dalam konteks ini dapat dirumuskan bahwa konsep hegemoni merujuk pada pengertian tentang situasi sosial politik. Dalam terminologinya "momen" filsafat dan praktek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang, dominasi merupakan lembaga dan manifestasi perorangan. Pengaruh "roh" ini membentuk moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik, dan semua relasi sosial, terutama dari intelektual dan hal-hal yang menunjuk pada moral.

Konsep hegemoni terkait dengan tiga bidang, yaitu ekonomi (economic), negara (state), dan rakyat (civil society) (Bocock, 1986). Ruang ekonomi menjadi fundamental. Namun, dunia politik yang menjadi arena dari hegemoni, juga menampilkan momen perkembangan tertinggi dari sejarah sebuah kelas. Dalam hal ini, pencapaian kekuasaan negara, konsekuensi yang dibawanya bagi kemungkinan perluasan dan pengembangan penuh dari hegemoni itu telah muncul secara parsial, memiliki sebuah signifikansi yang khusus. Negara dengan segala aspeknya, yang diperluas mencakup wilayah hegemoni, memberikan kepada kelas yang mendirikannya baik prestise maupun tampilan kesatuan sejarah kelas penguasa dalam bentuk konkret, yang dihasilkan dari hubungan organik antara negara atau masyarakat politik dan civil society. Pendek kata, hegemoni satu kelompok atas kelompok-kelompok lainnya dalam pengertian Gramscian bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Hegemoni itu harus diraih melalui upaya-upaya politis, kultural dan intelektual guna menciptakan pandangan dunia bersama bagi seluruh masyarakat. Teori politik Gramsci penjelasan bagaimana ide-ide atau ideologi menjadi sebuah instrumen dominasi yang memberikan pada kelompok penguasa legitimasi untuk berkuasa (Sugiono, 1999).

### **Pengertian dan Fungsi Prangko**

Prangko adalah selembar kertas kecil yang dikeluarkan oleh kantor pos, administrasi pos, atau vendor resmi lainnya kepada pelanggan yang membayar perangko (biaya yang diperlukan untuk memindahkan, mengasuransikan, atau mendaftarkan surat), yang kemudian membubuhkan prangko tersebut pada wajah atau sisi alamat setiap kiriman surat—amplop atau sampul pos lainnya yang ingin mereka kirim. Item tersebut kemudian diproses oleh sistem pos, di mana cap pos atau tanda pembatalan—dalam penggunaan modern yang menunjukkan tanggal dan titik asal pengiriman—ditempelkan pada prangko dan sisi kiri dan kanannya untuk mencegah penggunaan kembali. Barang tersebut kemudian dikirim ke penerimanya. (*Gerard Cheshire: 2017 A History of Victorian Postage*)

Menurut peraturan kementerian komunikasi dan informatika Indonesia Prangko adalah label atau carik, atau teraan di atas kertas dengan bentuk dan ukuran tertentu, baik bergambar maupun tidak bergambar, yang memuat nama negara penerbit atau tanda gambar yang merupakan ciri khas negara penerbit, dan mempunyai nilai nominal tertentu

berupa angka dan/atau huruf. (*Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2012 tanggal 5 Juli 2012*) Prangko ditempelkan pada amplop, kartu pos, atau benda pos lainnya sebelum dikirim. Pembayaran menggunakan prangko menjadi cara pembayaran yang paling populer dibanding cara lain, seperti menggunakan aerogram. Prangko pada hakekatnya adalah secarik kertas bergambar yang diterbitkan oleh pemerintah yang pada bagian belakang umumnya memuat perekat, sedangkan pada bagian depannya memuat suatu harga tertentu yang dimaksudkan untuk direkatkan pada kiriman pos. Dengan menempelkan prangko pada sepucuk surat berarti biaya pengiriman surat tersebut telah dilunasi oleh pengirim surat, dan sebagai imbalannya pos berkewajiban menyampaikan surat tersebut kepada alamatnya di tempat tujuan. Kegiatan surat-menyurat dan sistem perposan sebenarnya sudah dikenal manusia sebelum dikenalnya prangko. Dan setiap pemerintahan membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan sistem perposan.

### **Perang Pasifik**

Perang Pasifik, kadang-kadang disebut Perang Asia-Pasifik, adalah teater Perang Dunia II yang terjadi di Asia, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Oseania. Secara geografis merupakan teater perang terbesar, termasuk teater Samudra Pasifik yang luas, teater Pasifik Barat Daya, teater Asia Tenggara, Perang Tiongkok-Jepang Kedua, dan Perang Soviet-Jepang. (*Murray, Williamson; Millett, Allan R. (2001). A War to be Won: Fighting the Second World War*)

Di negara-negara Sekutu selama perang, "Perang Pasifik" biasanya tidak dibedakan dari Perang Dunia II pada umumnya, atau hanya dikenal sebagai Perang melawan Jepang. Di Amerika Serikat, istilah Teater Pasifik digunakan secara luas, meskipun istilah ini salah dalam kaitannya dengan kampanye Sekutu di Burma, perang di Cina dan kegiatan lain di dalam Teater Asia Tenggara. Namun, Angkatan Bersenjata AS menganggap Teater China-Burma-India berbeda dari Teater Asiatik-Pasifik selama konflik. Jepang menggunakan nama Perang Asia Timur Raya (大東亜戦争, Dai Tō-A Sens), seperti yang dipilih oleh keputusan kabinet pada 10 Desember 1941, untuk merujuk pada perang dengan Sekutu Barat dan perang yang sedang berlangsung di Tiongkok. Nama ini dirilis ke publik pada 12 Desember, dengan penjelasan bahwa itu melibatkan negara-negara Asia yang mencapai kemerdekaan mereka dari kekuatan Barat melalui angkatan bersenjata Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya.[52] Pejabat Jepang mengintegrasikan apa yang mereka sebut Insiden Jepang-China (日支事変, Nisshi Jihen) ke dalam Perang Asia Timur Raya. Selama pendudukan militer Sekutu di Jepang (1945–52), istilah Jepang ini dilarang dalam dokumen resmi, meskipun penggunaan informalnya berlanjut, dan perang tersebut secara resmi dikenal sebagai Perang Pasifik (太平洋戦争, Taiheiyō Sens). Di Jepang, Perang Lima Belas Tahun (十五年戦争, Jūgonen Sens) juga digunakan, mengacu pada periode dari Insiden Mukden tahun 1931 hingga 1945. (*Murray, Williamson; Millett, Allan R. (2001). A War to be Won: Fighting the Second World War*)

### **PEMBAHASAN**

#### **Invasi Jepang ke Hindia Belanda**

invasi Jepang ke Hindia Belanda dimulai pada 10 Januari 1942 di Kalimantan. Pasukan Belanda di Hindia bersama Amerika, Inggris, dan Australia, tidak mampu menahan mesin perang Jepang, dan akhirnya menyerah pada 8 Maret 1942.

Awalnya, Jepang dipandang sebagai pembebas potensial oleh penduduk setempat, karena Sukarno, seorang pemimpin nasionalis Indonesia yang populer mendukung pendudukan Jepang. Namun, orang Indonesia segera menemukan bahwa pemerintahan Jepang bahkan lebih keras, karena banyak yang diwajibkan menjadi pekerja paksa sementara makanan dan bahan-bahan dikirim dari pulau-pulau untuk mendukung upaya perang. Selain itu, lebih dari 100.000 orang Eropa, Cina, dan barat lainnya ditahan di kamp interniran, di mana banyak yang akhirnya meninggal karena kelaparan.

Selama pendudukan, Jepang membagi koloni menjadi tiga wilayah terpisah. Jawa diperintah oleh tentara Jepang ke-16, Sumatera diperintah oleh tentara Jepang ke-25, dan pulau-pulau terluar yang disebut Kalimantan dan Timur Raya yang diperintah oleh angkatan laut Jepang.

Armada Selatan ke-2 angkatan laut Jepang bermarkas di Makassar, di pulau Sulawesi menguasai pulau-pulau terluar seperti Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Kepulauan Sunda Kecil dan Maluku. Untuk wilayah ini, tujuan utama pendudukan adalah untuk menjaga hukum dan ketertiban, dan untuk mengekstrak sumber daya berharga yang tersedia di wilayah tersebut.

Jepang pertama kali sampai di Sulawesi pada 8 Januari 1942 dan menduduki seluruh pulau pada 30 Januari 1942 sejak saat itu seluruh pemerintahan termasuk pos dipegang oleh kekuasaan angkatan laut Jepang.

### **Penggunaan prangko Wilhelmina diakhir masa Hindia Belanda**

Pada masa Hindia Belanda prangko bergambar Wilhelmina merupakan salah satu design prangko Paling umum sampai pada tahun 1949 prangko Wilhelmina sebetulnya masih digunakan dengan tambahan-tambahan cetak tindih yang ada, pada sub bab ini akan membahas penggunaan prangko Wilhelmina di Sulawesi Utara pada masa akhir-akhir Hindia Belanda sebelum Jepang masuk, dan awal dari masa perang pasifik 1940-1942 masa dimana prangko Wilhelmina belum di cetak tindih oleh pemerintahan Angkatan laut Jepang dapat di buktikan dengan Surat-surat tahun 1940-1942.



Surat dikirim dari Manado ke New York USA, dikirim dari Futaba Shokai Manado Celebes Netherlands East Indies, merupakan perusahaan Teh milik Jepang yang berada di Manado, tahun 1940 merupakan awal meledaknya perang Pasifik dapat terlihat dari sensoran semua surat yang keluar negeri, tetapi pada masa ini Jepang belum berkuasa

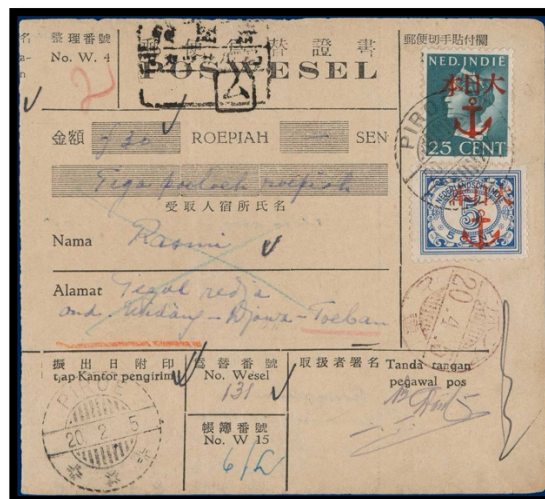
di Hindia Belanda, dan terlihat bahwa perusahaan Jepang menaati pemerangkoan Hindia Belanda, dengan sensor Perang dunia kedua, tahun 1940 pada masa-masa ini sangat terlihat bahwa kebebasan menggunakan prangko Wilhelmina di wilayah Sulawesi Utara.

Sampai pada tahun 1942 sebelum kedatangan Jepang ke Hindia Belanda, prangko Wilhelmina merupakan opsi yang selalu digunakan dikarenakan jumlahnya yang banyak membuat prangko ini umum digunakan sampai pada akhir-akhir Hindia Belanda sekalipun, berbarengan dengan prangko seri kerbau yang dicetak oleh Kreisler orang yang sama yang mendesign prangko Wilhelmina di akhir-akhir masa Hindia Belanda.

Masa penggunaan prangko Kreisler pun tetap dilanjutkan sampai masa kemerdekaan sekalipun menimbang banyaknya stock dan kurangnya sumber daya untuk mencetak prangko jenis baru, digunakanlah kebijakan cetak tindih prangko, dengan menghapuskan nama negara yang lama dan menghapuskan atau menambahkan simbol tertentu yang menyatakan kekuasaan baru lah yang berkuasa atas wilayah tersebut, hal ini terjadi di Hindia Belanda masa pendudukan Jepang.

### **Prangko cetak tindih angkatan Laut Jepang di kawasan timur**

Angkatan laut Jepang diberikan mandat untuk menguasai jalannya pemerintahan di Hindia Belanda bagian Timur yang meliputi wilayah Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku dan Papua, pada masa ini awalnya angkatan laut Jepang membuat kebijakan cetak tindih semua prangko Ned Indie menggunakan tulisan DAI NI HON dan juga lambang jangkar, menandakan bahwa kawasan Timur Hindia Belanda dikuasai oleh angkatan laut Jepang, berikut Jenis-jenis Cetak tindih angkatan laut Jepang diatas prangko Wilhelmina di kawasan Timur Hindia Belanda:



Prangko Wilhelmina digunakan berbarengan dengan prangko Numeral, dengan cetak tindih merah khas Maluku dikirim dari Piroe ke Toeban Jawa Timur, walaupun Maluku merupakan salah satu basis Belanda tetapi di prangko Maluku hanya menggunakan cetak tindih biasa layaknya di kawasan timur lainnya.

Di Sulawesi Selatan sekalipun terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara cetak tindih jangkar Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, Jangkar Sulawesi selatan berwarna hitam dengan bentuk yang relatif kecil dan positive printing, merupakan ciri khas dari Jangkar Sulawesi Selatan

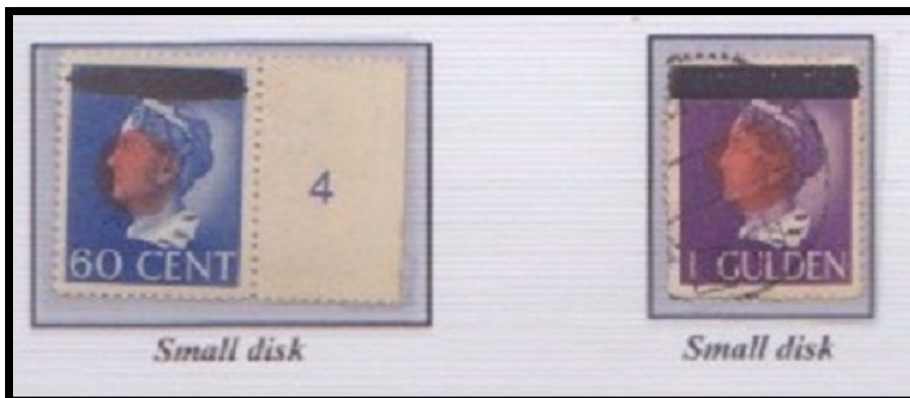


Prangko Cetak tindih Sulawesi Selatan diatas prangko Wilhelmina digunakan untuk mengirim Surat dari Makassar Ke Surabaya.

Dari Seluruh cetak Tindih dikawasan timur memang cetak terlihat ada satu kesamaan yaitu lambang jangkar diatas ratu Wilhelmina dan tulisan DAI NI HON diatasnya, hal-hal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan wilayah tersebut dibawah Angkatan laut Jepang pada masa pendudukan di Kawasan Timur, hal ini menjadi sebuah konsistensi dalam cetak tindih prangko diseluruh kawasan timur Hindia belanda terlebih prangko ratu Wilhelmina, tetapi apakah yang terjadi di Sulawesi utara dan menjadikannya kawasan yang "spesial" diantara kawasan Timur lainnya.

#### **Cetak Tindih Hinomaru khusus untuk Sulawesi Utara**

Hinomaru merupakan ciri khusus dari cetak tindih di Sulawesi Utara, karena Sulawesi Utara terlebih Minahasa yang dikatakan sebagai provinsi ke sembilan dari Belanda dan memiliki basis KNIL yang kuat serta merupakan benteng terakhir dari KNIL di Hindia Belanda dan banyaknya simpatisan Belanda dikawasan ini, oleh karena itu Pemerintahan Angkatan Laut Jepang menerapkan kebijakan cetak Tindih Hinomaru diatas prangko yang digunakan dikawasan Sulawesi Utara, berikut prangko cetak tindih Jepang di Sulawesi utara:



Pada Awal tahun 1942 dan mula-mula Jepang masuk ke Minahasa dan Sulawesi Utara, mereka telah menerapkan kebijakan cetak tindih Hinomaru tanpa Jangkar diatas prangko Ratu Wilhelmina.



Prangko cetak tindih Hinomaru

Diatas prangko Wilhelmina digunakan untuk berkirim Wessel dari Amoenang ke Menado tahun 1943. Setelah Tahun 1943 kebijakan pun bertambah dengan menambahkan cetak tindih Jangkar dan Dai Ni Hon yang sama dengan tipe Sulawesi Selatan, kebijakan ini berlangsung sampai akhir kekuasaan Jepang pada tahun 1945 dan terakhir terlihat di Gorontalo pada tahun 1946 dimana NICA telah menguasai kawasan Sulawesi Utara



Contoh beberapa Prangko Wilhelmina yang digunakan diwilayah Sulawesi Utara diatas tahun 1943 dengan adanya tambahan Jangkar yang sama dengan Jangkar tipe Sulawesi Selatan Di wilayah Sulawesi Utara ini kebijakan cetak tindih Hinomaru juga berlaku di prangko non Wilhelmina tetapi hampir semua prangko yang beredar di Sulawesi Utara, adanya penghapusan nama Ned Indie dan cetak tindih Hinomaru

Di wilayah Posso, terjadi sebuah peperangan besar antara KNIL dan Jepang, oleh karena itu Jepang membuat prangko Darurat untuk Posso, dengan Jangkar dan Dai Ni Hon khusus hanaya ada dikawasan Posso, yang membedakan adalah prangko kawasan ini tidak menggunakan Hinomaru diatas prangko Porto tetapi bila diatas prangko Wilhelmina akan tetap di cap dengan Hinomaru.



Prangko Porto yang dicetak tindih tipe Posso atau dikenal dengan FishHook Anchor merupakan prangko Darurat yang hanya dipakai di Posso pada masa pertempuran Posso

Cetak tindih Tipe Sulawesi Utara memang sangat berbeda dan mencolok diantara cetak tindih Jangkar dan Dai Ni Hon di wilayah Timur lainnya, dikarenakan banyaknya Konflik dakawasan ini dan Sulawesi Utara merupakan benteng terakhir dari KNIL Minahasa membuat Jepang perlu memperlakukan secara Khusus terhadap wilayah tersebut dan diterbitkanlah kebijakan penutupan nama negara dan penambahan Hinomaru pada cetak tindih prangko di Sulawesi Utara.

### **KESIMPULAN**

Sulawesi Utara atau tanah Minahasa merupakan benteng terakhir dari Hindia Belanda dimana daerah tersebut memiliki banyak simpatisan Belanda dan merupakan benteng terakhir dari KNIL Minahasa, perlakuan Jepang yang mengistimewakan wilayah ini menjadi wilayah administrasi Militer angkatan laut yang dimana seluruh simbol yang berkaitan dengan keagungan Belanda harus dihapuskan dan diganti dengan Hinomaru, dalam hal ini prangko menjadi media yang sempurna untuk melancarkan kebijakan serta propaganda ini, terlihat dengan jelas bahwa prangko wilayah Sulawesi Utara sangatlah berbeda dengan prangko lain dikawasan timur Hindia Belanda dengan ditutupnya wajah ratu Wilhelmina

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bessels, Gail J. 2011. *The Postage Stamps and Postal Stationery Printed by The Royal Print Works N.V.G. Kolff & Co. Batavia, Amsterdam: Dai Nippon*
- Negus, James. 1988. *How to Identify Stamps: Stanley Gibbons Stamp Collecting Series*
- Oktorino, Nino. 2018. *Nusantara Membara: Hancurnya KNIL Minahasa*
- Kisah terlupakan Palagan Manado 1942, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Onghokham. 2014. *Runtuhnya Hindia Belanda, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*

Scott, R Carlton. 1997. The International Encyclopaedic Dictionary of Philately, Iola WI:  
Krause Publications

Susilo, Richard. 2002. Mengenal Filateli di Indonesia: Tokyo: e-book

<http://officepromosi.com/1/MENGENAL-FILATELI-DI-INDONESIA>.

Vosse, Leo B. 2017. Catalogue of the postage stamps of the Netherlands East Indies Under  
Japanese occupation 1942-1945, Heiloo: Dai Nippon

Van Niewkerk, J.R, Leo B Vosse. 2013. The Cancellations used during the Japanese  
Occupation of the Dutch East Indies and Repoeblik Indonesia, 1942-1949, Heiloo:  
Dai Nippon

Van Niewkerk, J.R. 2009. The Postal History of the Lesser Sunda Islands, Moluccas, and  
New Guinea during the Japanese Occupation and Immediate Aftermath 1942-1946  
Heiloo: Dai Nippon